



Pemkot Perbaiki Skema TPP

YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih akan terus membenahi skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungannya. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, meski skema pertama sudah dibenahi ke skema kedua, tapi masih perlu dilakukan pembenahan tahap berikutnya.

"Kelemahannya di persentase presensi yang terlalu tinggi. Padahal presensi kewajiban PNS. Kita hadir itu bukan prestasi, melainkan kewajiban," ujarnya, Sabtu (19/1).

Heroe mengutarakan bahwa seharusnya porsi dari presensi yang masih besar tersebut, dialihkan untuk porsi kinerja, baik kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. "Selain itu, ini masih ada yang kurang maksimal yakni lembur belum terakomodasi. Nanti akan diperbaiki lagi. Sekarang ini lembur dan tidak lembur sama saja," ucapnya.

Walau demikian, berdasarkan evaluasi skema pertama, Heroe mengatakan bahwa penyelesaian program kerja semakin bagus. "Setiap bulan teman-teman OPD sudah membiarkan capaian yang belum dan akan menanganinya," ungkapnya.

Terkait serapan anggaran TPP 2018, Heroe mengatakan hampir seluruhnya terealisasi. Hal tersebut lantaran terdapat kebijakan dari pusat mengenai tunjangan 13 dan 14. "Hampir habis karena membayar tunjangan 13 dan 14. Walaupun ambil separuh, tapi hampir menghabiskan anggaran

● ke halaman 19

- ✓ - Bag organisasi
- BPKAD
- ✓ Netral
- ✓ Biasa
- ✓ Untuk diketahui

Pemkot Perbaiki Skema TPP

● Sambangan Hal 13

karena ada kebijakan mendadak," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo menjelaskan, bahwa sejak Oktober 2018 skema pemberian TPP pada pegawai Pemkot Yogyakarta telah berubah. Pada skema pertama TPP, presensi menduduki persentase terbesar yakni 60 persen, disusul kinerja pegawai 20 persen, serta kinerja organisasi 20 persen.

Namun, lanjutnya, dalam perwal yang baru yakni Perwal 48/2018 tentang TPP Berbasis Kinerja terjadi perubahan indikator pemberian TPP. TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100 persen seluruh bobot indikator.

"Kalau saat ini, presensi hanya 40 persen dari 50 persen indikator statis. Sementara persentase terbesar ada di indikator dinamis sebesar 50 persen yang merupakan aktivitas harian jabatan," ujarnya.

Selain persentase untuk presensi yang berkurang, Kris juga mengungkapkan bahwa dalam skema terbaru khususnya untuk aktivitas harian jabatan, pegawai yang bersangkutan harus berperan aktif memilih dan mengajukan aktivitas tambahan dalam e-kinerja.

"Kalau sebelumnya di skema pertama, inputnya secara manual dari OPD. Saat ini semua pegawai wajib melaporkan apa yang dikerjakan tiap harinya, dari menit, jam, dan harian. Kurang dalam mengisi aktivitas harian, maka dipotong TPP-nya," bebernya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menjelaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk TPP 2019. Untuk diketahui, anggaran untuk TPP di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta pada 2018 lalu mencapai Rp181 miliar. Anggaran TPP 2019 masih sama dengan 2018, tuturnya. (kur)

IG. TRIHASTONO, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005